

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan ukuran pendapatan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Apabila dilihat berdasarkan pola waktu, kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat, meliputi (1) *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun; (2) *cyclical poverty*, merupakan kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (3) *seasonal poverty*, adalah kemiskinan musiman yang sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian; dan (4) *accident poverty*, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik, dan kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat, Kuncoro (1997).

Masalah kemiskinan di Indonesia cukup rumit karena luas wilayah, beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat, dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Selain itu, masalah kemiskinan juga bersifat multidimensional karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, tetapi juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin, kegagalan dalam pemenuhan hak dasar, dan adanya perbedaan perlakuan seseorang

atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Determinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti faktor yang menentukan, sehingga apabila diartikan dalam konteks analisa kemiskinan, determinan dapat didefinisikan sebagai faktor yang menentukan (penentu).

Faktor penentu atau determinan kemiskinan diantaranya adalah ekonomi (pendapatan, nutrisi, perumahan), sosial (keterasingan, merasa tidak aman), politik dan budaya (pendidikan, kepercayaan diri), sedangkan Usman (2006) menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat berupa karakteristik makro, sektor, komunitas, rumah tangga, dan individu.

Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif Ginandjar (1996). Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.

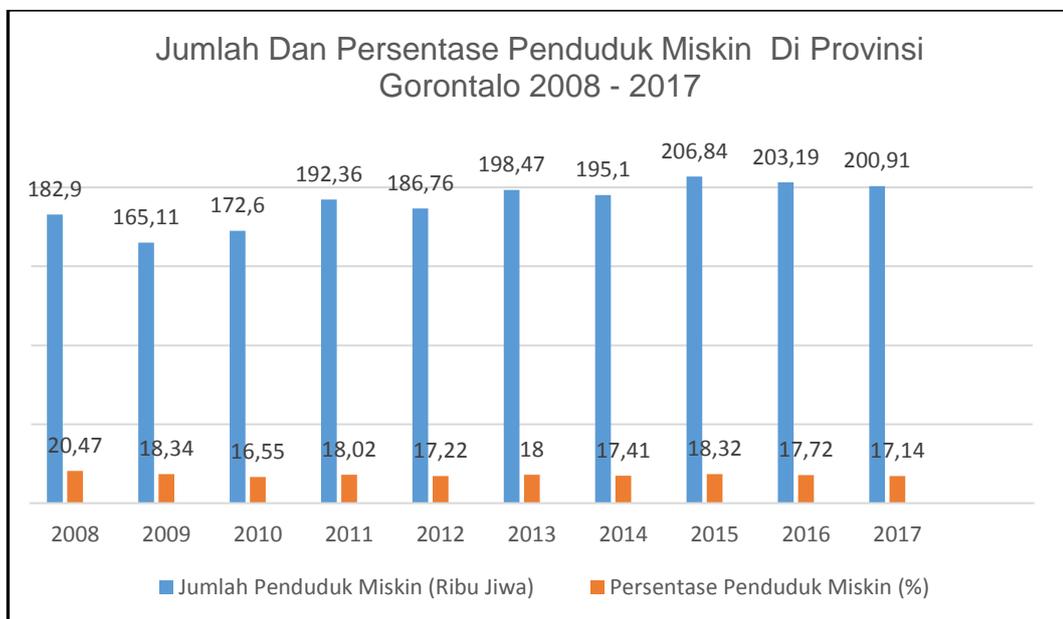
Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidak-mampuan akses secara ekonomi, sosial,

budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan, akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan minimum; kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

Sejak provinsi ini terbentuk jumlah dan persentase penduduk miskin terus bergerak turun, setidaknya sampai dengan tahun 2008. Penurunan ini bahkan telah menempatkan Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang mengalami penurunan kemiskinan tercepat secara regional. Namun pada tahun 2009, jumlah dan persentase penduduk miskin merambat naik. Peningkatan ini, tentu saja, agak mengejutkan, ditengah berbagai upaya yang dilakukan untuk memerangi kemiskinan di daerah ini. Penanganan kemiskinan di daerah ini, terutama dalam dua-tiga tahun terakhir, telah mengalami kemajuan signifikan. daerah ini telah melakukan berbagai langkah konstruktif, diantaranya pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), penyusunan Master Plan Penanggulangan Kemiskinan, pembentukan SKPD dengan nomenklatur penanggulangan kemiskinan, peningkatan alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan, seminar tahunan guna me-review dinamika kemiskinan, dan sebagainya. Namun berbagai upaya ini tampaknya tidak berjalan paralel dengan penurunan angka kemiskinan.

Realitas kemiskinan di Provinsi Gorontalo sebagaimana dikemukakan di atas, melahirkan banyak implikasi. Pertama, desain perencanaan dan penganggaran yang diperuntukkan bagi kaum miskin ternyata tidak bekerja efektif, setidaknya untuk tahun 2009. Strategi penanggulangan kemiskinan yang digagas oleh TKPKD Gorontalo di awal tahun 2009 terbukti tidak cukup ampuh untuk menurunkan angka kemiskinan. Pembengkakan jumlah penduduk miskin sekitar 3.000 orang (netto) pada tahun 2009 memberi sinyal kuat atas kegagalan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan. Penanganan kemiskinan sepertinya tidak didasarkan pada hasil kemiskinan yang valid dan akurat.

Grafik 1.1

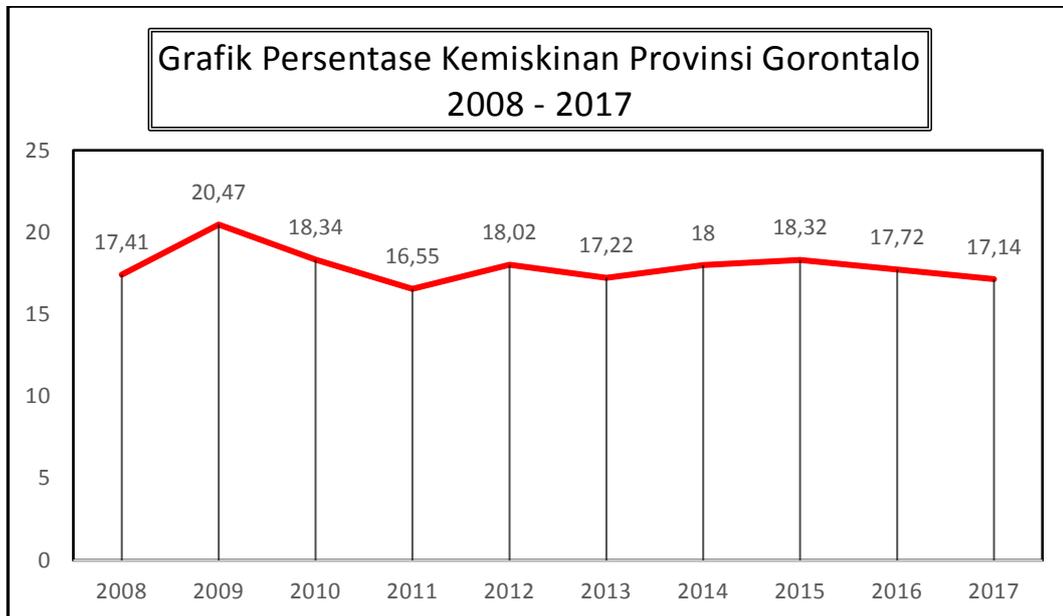


Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Gorontalo 2018

Berdasarkan Survei Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo pada bulan September 2015, persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 18,16 persen. Dibandingkan persentase penduduk miskin pada Maret 2015 sebesar 18,32 persen, berarti terjadi penurunan sebesar 0,16 persen, Meski demikian, Gorontalo masih menempati posisi tertinggi dalam hal angka kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk miskin pada bulan September 2015 di Provinsi Gorontalo sebanyak 206.513 jiwa, sementara jumlah penduduk miskin Maret 2015 sebanyak 206.843 jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret 2015-September 2015 berkurang sebanyak 330 jiwa. Pada periode ini, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan, sedangkan di perdesaan mengalami penurunan. Kenaikan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 1.642 jiwa, sedangkan penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 1.972 jiwa.

Penduduk miskin di Gorontalo sebagian besar tinggal di perdesaan yaitu sebesar 86,92 persen dan sisanya 13,08 persen tinggal di wilayah perkotaan dari total jumlah penduduk miskin. Terlihat dari kontribusi kemiskinan yang di sumbang oleh pekerja yang bekerja di sektor pertanian.

Grafik 1.2



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Gorontalo 2018

Provinsi Gorontalo terdiri dari 6 kabupaten dan kota, Kabupaten Pohuwato mengisi posisi pertama dengan persentase kemiskinan tertinggi yaitu 22,43% pada tahun 2015, sementara itu Kabupaten Gorontalo dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu 21,80% setelah pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 18,73%, kemudian disusul oleh Kabupaten Boalemo dengan 21,67% kemudian Kabupaten Gorontalo Utara yang baru dimekarkan pada tahun 2007 memperoleh 18,93% pada tahun 2015, Kabupaten Bone Bolango memiliki persentase kemiskinan sebesar 18,49% dan Kota Gorontalo yang merupakan Ibukota Provinsi hanya memperoleh 6,05%. Di atas adalah Tabel persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Dari tahun 2008-2017.

Fadilah (2016) menemukan bahwa apabila PDRB per kapita meningkat maka penduduk miskin menurun, pengangguran meningkat maka penduduk miskin meningkat, IPM meningkat maka penduduk miskin menurun, dan apabila populasi meningkat maka penduduk miskin pun meningkat.

Saleh (2002) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan per propinsi di Indonesia adalah indeks pembangunan manusia (terdiri dari pendapatan perkapita, angka harapan hidup, rata-rata bersekolah), investasi fisik pemerintah daerah, tingkat kesenjangan pendapatan, tingkat partisipasi ekonomi dan politik perempuan, populasi penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan, populasi penduduk tanpa akses terhadap air bersih, dan krisis ekonomi.

Menurut Oktaviani dalam Saskia (2014) dalam analisisnya tentang bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran di Indonesia maka jumlah penduduk miskin di Indonesia juga akan semakin bertambah seiring pertambahan jumlah pengangguran.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih komprehensif tentang “Determinan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo periode 2008-2017”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo
2. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo
3. Seberapa Besar pengaruh produktifitas tenaga kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo
4. Seberapa Besar pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo
2. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo
3. Menganalisis Pengaruh Produktifitas tenaga kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo
4. Menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yakni :

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna untuk mengkaji sejauh mana Provinsi Gorontalo dalam mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

2. Secara Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan yakni bagi ilmu pengetahuan dan dapat melengkapi kajian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo.